



2014

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA****B2**

Tambahkan Berita Negara R.I Tanggal 20 Juni 2014 No. 49

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1996 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Prof. Dr. THOMAS DJ AMALUDDIN, M.B.A.
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 70806
4. Alamat Kantor : Jl. PEMUDA PERSIL NO. 1, JAKARTA TIMUR
5. Tanggal Pelaporan : 6 Februari 2012, 1 April 2014

Status Laporan

6 Februari 2012	1 April 2014
-----------------	--------------

II. DATA HARTA**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

	Rp. 106.065.000	Rp. 202.210.000
1. Tanah & Bangunan seluas 69 m2 & 50 m2, di Kota CIMAHI, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2007	Rp. 52.865.000	Rp. 52.865.000
2. Tanah & Bangunan seluas 70 m2 & 50 m2, di Kota CIMAHI, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1994 sampai dengan 2002	Rp. 53.200.000	Rp. 53.200.000

70806	Status Laporan	
	6 Februari 2012	1 April 2014
3. Tanah seluas 287 m ² , di Kota CIMAHI, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2012 (Penambahan Data Baru)	—	Rp. 96.145.000
B. HARTA BERGERAK		
a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	Rp. 154.000.000	Rp. 150.000.000
1. Mobil, merk DAIHATSU XENIA, tahun pembuatan 2010, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 130.000.000	Rp. 120.000.000
2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2010, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 9.000.000	Rp. 8.000.000
3. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2005, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2005 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 8.000.000	Rp. 6.000.000
4. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013 (Penambahan Data Baru)	—	Rp. 16.000.000
5. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2004 (Penghapusan Data Karena Dihilangkan)	Rp. 7.000.000	—
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	—	—
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 44.344.000	Rp. 45.600.000

70806	Status Laporan	
	6 Februari 2012	1 April 2014
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1989 sampai dengan 2013 (Penambahan Data karena Penggabungan, Penghapusan Data Karena Penggabungan)	Rp. 22.544.000	Rp. 25.600.000
2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1994 sampai dengan 2013 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 21.800.000	Rp. 20.000.000
C. SURAT BERTHARGA	Rp. 0	Rp. 0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 152.844.625	Rp. 166.225.393
	USD 960	
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Penghapusan Data Karena Dikonsumsi, Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 152.844.625	Rp. 150.559.393
	USD 960	
2. Yang berasal dari WARISAN (Penambahan Data Harta Kekayaan)	—	Rp. 15.666.000
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)	Rp. 457.253.625	Rp. 564.035.393
	USD 960	—
III. HUTANG	Rp. 131.280.000	Rp. 54.700.000
1. Hutang dalam bentuk PINJ AMAN BARANG (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 131.280.000	Rp. 54.700.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II -III)	Rp. 325.973.625	Rp. 509.335.393
	USD 960	

70806

Status Laporan

6 Februari 2012

1 April 2014

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PLH. DEPUTI

Jakarta, 10 Juni 2014
DIREKTORAT PENDAFTARAN
DAN PEMERIKSAAN LHKPN
DIREKTUR

TTD
CAHYA H. HAREFA

TTD
CAHYA H. HAREFA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.